OPEN ACCESS

Nagri Pustaka: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sejarah, dan Budaya
E-ISSN: 3032-0151 | Vol. 4 No. 4, 2026 | Pages 208-217
https://journal.yazri.com/index.php/nagripustaka

Transformasi Mediasi Adat dan Resiliensi Spasial Masyarakat Sasak dalam Menghadapi Kolonialisme pada Perang Gandor Tahun 1895

Rido Fandika Agung[1]✉, Syahrul Amar[2], Suhupawati[3]
(1,2,3) Universitas Hamzanwadi, Lombok Timur, Indonesia

Received: 20-09-2026 | Revised: 05-10-2026 | Accepted: 12-10-2026

Corresponding Author:
Rido Fandika Agung,
Pendidikan Sejarah, Universitas Hamzanwadi, Jalan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No. 132, Pancor, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat 83612, Indonesia
Email: idhookalandra@gmail.com

ABSTRAK

Perang Gandor 1895 di Lombok Timur selama ini lebih sering dipahami sebagai perlawanan fisik terhadap kolonialisme, sementara strategi masyarakat dalam mengelola konflik belum banyak dibahas. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan fungsi mediasi adat, pengendalian sosial melalui norma dan sanksi, serta resiliensi spasial masyarakat Sasak setelah konflik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus historis. Data diperoleh melalui observasi terhadap situs memori dan praktik budaya, wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, dan tetua masyarakat yang dipilih secara purposif, serta studi dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah adat berkembang dari mekanisme penyelesaian persoalan internal menjadi sarana konsolidasi antardesa dalam menghadapi kekuasaan kolonial. Norma sosial berperan menjaga kepercayaan dan solidaritas, sedangkan perpindahan penduduk mendorong pemeliharaan identitas melalui ingatan kolektif dan penamaan tempat. Temuan ini memperlihatkan sifat adaptif kearifan lokal dalam pengelolaan konflik dan pemulihan komunitas dalam tekanan kolonial setempat. Penjelasan mengenai bentuk sanksi dan asal-usul toponimi masih memerlukan verifikasi sejarah lisan dan dokumenter.

The 1895 Gandor War in East Lombok is commonly understood as physical resistance to colonial rule, while community strategies for managing conflict remain insufficiently examined. This study analyzes customary mediation, social control through norms and sanctions, and the spatial resilience of the Sasak community. It uses a qualitative approach and historical case study design. Data were gathered through observation of memory sites, in-depth interviews with customary leaders, religious figures, and community elders selected purposively, and documentary research. Analysis involved data reduction, display, and conclusion drawing. The findings indicate that customary deliberation shifted from resolving internal disputes to facilitating inter-village consolidation against colonial power. Social norms helped maintain trust and solidarity, while displacement encouraged the preservation of communal identity through collective memory and place names. These findings demonstrate the adaptive role of local wisdom in conflict management and community recovery in practice. Oral-history and documentary verification is needed to establish the forms of social sanctions and the origins of place names.

Kata kunci: mediasi adat, masyarakat sasak, perang gandor, resiliensi spasial

Pendahuluan

Perang Gandor tahun 1895 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perlawanan masyarakat Sasak terhadap kekuasaan kolonial Hindia Belanda di Pulau Lombok. Peristiwa tersebut tidak hanya memperlihatkan pertentangan antara masyarakat lokal dan kekuatan kolonial, tetapi juga menggambarkan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat pada masa itu. Selama ini, pembahasan mengenai Perang Gandor cenderung menempatkan peristiwa tersebut dalam kerangka

© 202x The Author(s). Published by Yazri Aksara Nusantara, ID

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

perlawanan fisik terhadap kolonialisme, termasuk persoalan eksploitasi ekonomi dan pengaruh kekuasaan kolonial terhadap kehidupan masyarakat setempat (Salam & Jaya, 2005). Padahal, di balik peristiwa perlawanan tersebut terdapat aspek sosial yang tidak kalah penting untuk dikaji, terutama mengenai bagaimana masyarakat membangun kesepakatan, mempertahankan solidaritas, dan mengelola hubungan antarkelompok ketika menghadapi ancaman eksternal. Oleh karena itu, Perang Gandor perlu dipahami tidak hanya sebagai peristiwa peperangan, tetapi juga sebagai proses sosial yang memperlihatkan kapasitas masyarakat lokal dalam mempertahankan keberlangsungan komunitasnya.

Dalam perspektif sosiologi konflik, keberadaan lembaga dan mekanisme sosial lokal memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antarkelompok serta menjaga keteraturan masyarakat. Mediasi dan musyawarah adat pada umumnya dipahami sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan internal yang bertujuan memulihkan hubungan sosial dan membangun kesepakatan bersama (Fisher, Ury, & Patton, 2011; Syarifudin, 2015). Namun, fungsi tersebut tidak selalu terbatas pada penyelesaian konflik dalam lingkup komunitas. Dalam situasi ketika masyarakat menghadapi tekanan dari kekuatan eksternal, mekanisme adat berpotensi berkembang menjadi sarana koordinasi, pembentukan solidaritas, dan penyatuan kepentingan bersama. Perspektif solidaritas sosial Durkheim (2013) memberikan landasan untuk memahami bagaimana nilai, norma, dan kesadaran kolektif dapat membentuk keterikatan antaranggota masyarakat. Sementara itu, teori konflik Coser (1956) menjelaskan bahwa ancaman dari luar kelompok dapat memperkuat kohesi internal apabila masyarakat memiliki kepentingan dan identitas bersama. Kedua perspektif tersebut relevan untuk menganalisis kemungkinan perubahan fungsi mediasi adat dalam konteks Perang Gandor, khususnya ketika musyawarah tidak hanya berhubungan dengan penyelesaian perselisihan, tetapi juga dengan pembentukan konsolidasi sosial menghadapi kekuasaan kolonial.

Selain mekanisme penyelesaian konflik, keberlangsungan identitas masyarakat setelah peperangan juga menjadi aspek penting dalam memahami pengalaman historis masyarakat Sasak. Kekalahan dalam suatu konflik tidak selalu mengakibatkan hilangnya ikatan sosial dan identitas kelompok, karena masyarakat dapat mempertahankan hubungan kolektif melalui praktik budaya, ingatan antargenerasi, dan keterikatan terhadap ruang tempat tinggal. Halbwachs (1992) menjelaskan bahwa memori kolektif terbentuk melalui kerangka sosial yang memungkinkan suatu kelompok mempertahankan dan mewariskan ingatan bersama. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Nora (1989) melalui konsep lieux de mémoire menunjukkan bahwa tempat dan simbol tertentu dapat menjadi medium yang mempertahankan ingatan historis suatu komunitas. Dalam konteks masyarakat Penedagandor, keberadaan nama tempat seperti Penedagandor, Subak Gandor, dan Kampung Gandor dapat menjadi pintu masuk untuk memahami hubungan antara perubahan ruang, pengalaman perpindahan masyarakat, dan keberlanjutan identitas lokal. Pemaknaan terhadap toponimi tersebut perlu didasarkan pada keterangan historis dan narasi masyarakat, sehingga hubungan antara penamaan tempat dan memori kolektif tidak hanya menjadi asumsi, tetapi memiliki dasar interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah memberikan landasan untuk memahami konflik dan perubahan sosial dalam masyarakat, termasuk kajian mengenai penyelesaian konflik berbasis lembaga adat, sanksi sosial, serta nilai-nilai lokal masyarakat Sasak (Samsul, 2014; Idrus, 2016; Dasor, 2020; Asyari & Kadri, 2025). Kajian Salam dan Jaya (2005) juga menjadi rujukan penting dalam memahami Perang Gandor 1895 sebagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap

kekuasaan kolonial. Meskipun demikian, pembahasan mengenai peristiwa tersebut masih memerlukan pengembangan, terutama dalam menjelaskan hubungan antara mekanisme mediasi adat, pengendalian sosial, dan keberlanjutan identitas masyarakat setelah konflik. Persoalan yang belum banyak memperoleh perhatian adalah bagaimana praktik musyawarah adat dapat berfungsi dalam membangun konsolidasi lintas desa, bagaimana norma sosial dimaknai dalam situasi ancaman kolonial, serta bagaimana identitas komunitas dipertahankan melalui ruang dan penamaan tempat setelah terjadinya perpindahan penduduk. Kesenjangan tersebut menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk mengembangkan pembacaan yang lebih menyeluruh terhadap dimensi sosial Perang Gandor, bukan sekadar mengulang uraian mengenai kronologi dan jalannya peperangan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada tiga aspek yang saling berkaitan. Pertama, perubahan fungsi mediasi adat dari mekanisme penyelesaian perselisihan internal menjadi sarana konsolidasi sosial dalam menghadapi kekuasaan kolonial. Kedua, kedudukan sanksi sosial sebagai mekanisme pengendalian perilaku masyarakat, terutama dalam konteks menjaga solidaritas dan kepercayaan di tengah situasi konflik. Ketiga, keberlanjutan identitas masyarakat melalui penamaan tempat sebagai bagian dari pemeliharaan memori kolektif setelah terjadinya dispersi sosial. Ketiga aspek tersebut dianalisis dengan memperhatikan keterkaitan antara institusi adat, struktur hubungan sosial, dan pengalaman historis masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak menempatkan mediasi adat semata-mata sebagai sarana rekonsiliasi, tetapi juga mengkaji perannya dalam membangun kesatuan sosial. Demikian pula, toponimi tidak hanya dipandang sebagai penanda geografis, melainkan sebagai fenomena sosial yang dapat merepresentasikan hubungan masyarakat dengan sejarah dan ruang kehidupannya.

Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi penyelesaian konflik dalam Perang Gandor tahun 1895 di Desa Penedagandor, Lombok Timur, dengan menitikberatkan pada transformasi mediasi adat, fungsi sanksi sosial, dan pemeliharaan identitas melalui toponimi. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sejarah lokal dan sosiologi konflik dengan memperlihatkan keterkaitan antara mekanisme adat, solidaritas sosial, dan memori kolektif dalam pengalaman perlawanan masyarakat Sasak. Kebaruan penelitian terletak pada upaya mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut dalam satu kerangka analisis untuk memahami strategi masyarakat dalam menghadapi konflik kolonial dan mempertahankan keberlangsungan identitas komunitas. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai peran kearifan lokal dalam dinamika konflik historis sekaligus memberikan perspektif bagi penelitian selanjutnya tentang hubungan antara institusi adat, perubahan sosial, dan memori kolektif dalam sejarah masyarakat lokal.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus historis untuk mengkaji strategi penyelesaian konflik dalam Perang Gandor tahun 1895 di Desa Penedagandor, Lombok Timur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami peristiwa sejarah tidak hanya berdasarkan kronologi kejadian, tetapi juga melalui makna sosial, pengalaman, dan ingatan masyarakat yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Desain studi kasus digunakan untuk menelaah fenomena secara mendalam dengan memperhatikan konteks historis dan sosial yang melingkupinya. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diarahkan untuk mengungkap keterkaitan antara praktik mediasi adat, pengendalian sosial, dan pemaknaan

ruang dalam kehidupan masyarakat Sasak. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi perspektif masyarakat serta menginterpretasikan fenomena berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian (Creswell, 2016; Schlunegger et al., 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Wawancara ditujukan kepada tokoh adat, tokoh agama, serta anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai sejarah Perang Gandor dan tradisi lisan yang berkembang di Desa Penedagandor. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan pengetahuan dan relevansi informasi yang dimiliki terhadap fokus penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial masyarakat serta ruang-ruang yang berkaitan dengan ingatan kolektif terhadap Perang Gandor. Selain data lapangan, penelitian juga memanfaatkan sumber tertulis dan literatur sejarah yang relevan, termasuk karya Ricklefs (2008) dan Sjamsoeddin (1972) sebagaimana tercantum dalam naskah awal. Sumber-sumber tersebut digunakan sebagai bahan pembanding dalam memahami informasi sejarah yang diperoleh dari masyarakat. Penggunaan wawancara, observasi, dan dokumentasi secara bersamaan dimaksudkan untuk memperoleh data dari sudut pandang yang berbeda serta memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang diteliti (Schlunegger et al., 2024).

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui penelaahan, pengorganisasian, pengelompokan, dan interpretasi terhadap seluruh informasi yang diperoleh. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu ditelaah untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data dikelompokkan berdasarkan tiga fokus kajian, yaitu strategi mediasi adat dalam penyelesaian konflik, bentuk pengendalian sosial masyarakat, serta pemaknaan ruang dan toponimi yang berkaitan dengan Perang Gandor. Informasi yang telah dikelompokkan kemudian dianalisis secara tematik dengan memperhatikan hubungan antara keterangan informan, sumber dokumenter, dan konteks historis peristiwa. Proses analisis dilakukan secara berulang melalui pembacaan kembali dan penafsiran data untuk menemukan pola, keterkaitan, serta makna yang sesuai dengan fokus penelitian. Tahapan tersebut sejalan dengan analisis data kualitatif yang menempatkan proses pengorganisasian, pengodean, pengembangan tema, dan interpretasi sebagai bagian yang saling berkaitan dalam menghasilkan temuan penelitian (Dahal, 2025).

Hasil Penelitian

Dinamika Konflik dan Dispersi Sosial Masyarakat Gandor

Perang Gandor tahun 1895 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perlawanan masyarakat Sasak terhadap kekuasaan kolonial Belanda di Lombok Timur. Peristiwa ini tidak dapat dipahami hanya sebagai pertentangan bersenjata antara masyarakat lokal dan pemerintah kolonial, tetapi perlu ditempatkan dalam konteks tekanan sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan yang dialami masyarakat pada masa itu. Tekanan kolonial terhadap kehidupan masyarakat turut membentuk situasi konflik yang semakin kompleks, terutama ketika kepentingan dan tatanan sosial masyarakat lokal berhadapan dengan kepentingan kekuasaan kolonial. Dalam kondisi tersebut, masyarakat Gandor menghadapi persoalan yang tidak hanya menyangkut keberlangsungan kehidupan sehari-hari, tetapi juga menyentuh identitas, keyakinan, dan keberadaan komunitas mereka.

Salah satu aspek penting dalam dinamika Perang Gandor adalah munculnya upaya konsolidasi antarkelompok masyarakat melalui mekanisme musyawarah adat. Berdasarkan keterangan historis yang menjadi dasar penelitian ini, pertemuan lintas desa yang melibatkan masyarakat Gandor, Apitaik, dan Teros dilaksanakan pada 1 dan 3 Muharam 1313 H.

Pertemuan tersebut memperlihatkan bahwa respons masyarakat terhadap tekanan kolonial tidak sepenuhnya berlangsung secara spontan atau terpisah-pisah. Terdapat upaya membangun kesepahaman dan menyatukan kekuatan antarkelompok yang memiliki hubungan sosial dan historis. Musyawarah menjadi ruang untuk membicarakan ancaman yang dihadapi bersama, membangun kesadaran kolektif, serta merumuskan sikap terhadap kekuasaan kolonial. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa hubungan antardesa memiliki peranan penting dalam membentuk solidaritas masyarakat ketika menghadapi ancaman dari luar komunitas.

Konsolidasi tersebut kemudian berlangsung dalam situasi konflik yang semakin terbuka. Perlawanan masyarakat Gandor menghadapi tekanan militer kolonial dan berujung pada kekalahan secara fisik. Dampak konflik tidak berhenti pada berakhirnya pertempuran, tetapi juga menyentuh kehidupan sosial masyarakat. Pembakaran permukiman dan perpindahan penduduk menyebabkan sebagian masyarakat meninggalkan ruang hidup yang sebelumnya menjadi pusat aktivitas keluarga, hubungan kekerabatan, kegiatan keagamaan, dan pengelolaan lahan pertanian. Sebagian masyarakat kemudian menyebar ke sejumlah wilayah, termasuk Selong dan Labuhan. Perpindahan ini memperlihatkan bahwa perang telah mengubah susunan kehidupan masyarakat secara mendasar. Ruang tempat tinggal yang sebelumnya menjadi pusat interaksi sosial tidak lagi dapat menjalankan fungsi sebagaimana sebelumnya, sementara masyarakat harus membangun kembali kehidupan dalam lingkungan yang berbeda.

Meskipun mengalami kekalahan dan dispersi, masyarakat Gandor tidak sepenuhnya kehilangan ikatan sosial yang telah terbentuk sebelum perang. Hubungan kekerabatan, ingatan terhadap asal-usul komunitas, serta nilai-nilai yang diwariskan antargenerasi menjadi unsur penting dalam mempertahankan identitas kelompok. Dalam perspektif Coser (1956), konflik yang melibatkan ancaman dari kelompok luar dapat memperkuat solidaritas internal karena anggota kelompok memiliki pengalaman dan kepentingan bersama yang harus dipertahankan. Situasi Perang Gandor memperlihatkan bagaimana tekanan kolonial mendorong masyarakat membangun kesadaran kolektif yang melampaui batas permukiman. Solidaritas tersebut tidak hanya terlihat dalam proses konsolidasi sebelum perlawanan, tetapi juga dalam upaya mempertahankan hubungan sosial setelah masyarakat mengalami perpindahan. Oleh karena itu, dinamika Perang Gandor perlu dipahami sebagai proses yang mencakup pembentukan solidaritas, perlawanan, kehilangan ruang hidup, dan usaha mempertahankan keberlanjutan komunitas.

Tabel 1. Kronologi Konsolidasi dan Dampak Sosial Perang Gandor (1895)

No.	Tahapan	Waktu (Hijriah/Masehi)	Kegiatan Strategis	Dampak Sosial/Spasial
1	Konsolidasi I	1 Muharam 1313 H / Juni 1895	Pertemuan lintas desa yang melibatkan Gandor, Apitaik, dan Teros	Terbangunnya upaya penyatuan kelompok masyarakat
2	Konsolidasi II	3 Muharam 1313 H / Juni 1895	Pemantapan kesepahaman dan strategi perlawanan	Penguatan hubungan dan koordinasi antarkelompok
3	Serangan dan Puncak Konflik	15–17 Muharam 1313 H / Juli 1895	Perlawanan masyarakat terhadap kekuatan kolonial	Meningkatnya dampak konflik terhadap kehidupan masyarakat
4	Pascaperang	Akhir 1895	Pembakaran permukiman dan perpindahan masyarakat	Dispersi penduduk dan pembentukan ruang kehidupan baru

Transformasi Mediasi Adat dalam Konsolidasi Perlawanan

Dalam kehidupan masyarakat Sasak, musyawarah adat merupakan salah satu mekanisme sosial yang berfungsi menjaga hubungan antarwarga dan menyelesaikan persoalan yang muncul

di lingkungan komunitas. Mekanisme tersebut bertumpu pada hubungan kekerabatan, penghormatan terhadap tokoh masyarakat, serta kesepakatan mengenai nilai dan norma yang berlaku. Dalam situasi masyarakat yang relatif stabil, musyawarah biasanya diarahkan untuk mencari penyelesaian terhadap persoalan internal agar hubungan sosial tetap terpelihara. Lembaga adat tidak hanya berperan sebagai tempat menyampaikan pendapat, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kesepahaman dan mempertahankan keseimbangan kehidupan bersama. Fungsi tersebut memperlihatkan bahwa mediasi adat memiliki kedudukan penting dalam menjaga keteraturan sosial masyarakat.

Situasi yang dihadapi masyarakat Gandor menjelang Perang Gandor 1895 memperlihatkan perubahan orientasi penggunaan mekanisme musyawarah tersebut. Ketika masyarakat berhadapan dengan tekanan kolonial, persoalan yang dibicarakan tidak lagi terbatas pada perselisihan antarindividu atau antarkelompok dalam komunitas. Musyawarah mulai diarahkan pada persoalan yang menyangkut keberlangsungan kehidupan bersama dan ancaman terhadap tatanan sosial masyarakat. Pertemuan lintas desa yang melibatkan Gandor, Apitaik, dan Teros menunjukkan bahwa mekanisme adat dapat digunakan untuk mempertemukan berbagai kelompok dalam menghadapi persoalan yang lebih luas. Dalam konteks ini, musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik internal, tetapi juga menjadi ruang diplomasi sosial untuk membangun kesepakatan, memperkuat koordinasi, dan menyatukan sikap masyarakat terhadap kekuasaan kolonial.

Perubahan fungsi tersebut juga berkaitan dengan peran tokoh adat dan tokoh agama dalam membangun konsolidasi masyarakat. Nama Mamiq Mustiasih muncul dalam narasi mengenai kepemimpinan masyarakat Gandor, sementara jaringan keagamaan yang berkembang melalui tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah memperlihatkan adanya hubungan antara kehidupan spiritual dan solidaritas sosial. Dalam masyarakat yang memiliki ikatan keagamaan kuat, tokoh agama tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan spiritual, tetapi juga dapat menjadi figur yang dipercaya dalam menyampaikan pandangan dan membangun kesadaran bersama. Hubungan antara tokoh adat dan tokoh agama memungkinkan terbentuknya komunikasi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Peranan mereka perlu dipahami sebagai bagian dari proses konsolidasi sosial yang menghubungkan nilai adat, keyakinan keagamaan, dan kepentingan kolektif masyarakat dalam menghadapi tekanan kolonial.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa mediasi adat memiliki kapasitas untuk beradaptasi ketika masyarakat menghadapi perubahan situasi sosial dan politik. Coser (1956) menjelaskan bahwa konflik dengan kelompok luar dapat memperkuat solidaritas internal karena anggota kelompok terdorong untuk mempertahankan kepentingan dan identitas bersama. Dalam Perang Gandor, musyawarah adat memperlihatkan fungsi yang lebih luas daripada penyelesaian sengketa internal. Mekanisme tersebut menjadi sarana integrasi sosial yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dalam menghadapi ancaman bersama. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai peran lembaga adat dalam resolusi konflik. Lembaga adat tidak selalu bekerja untuk mengakhiri pertentangan melalui perdamaian antarpihak, tetapi dalam situasi tertentu dapat berfungsi membangun kesatuan sikap dan memperkuat posisi komunitas ketika berhadapan dengan kekuatan eksternal. Perubahan orientasi inilah yang menjadi salah satu karakter penting strategi penyelesaian konflik dalam Perang Gandor.

Pengendalian Sosial dan Resiliensi Spasial Masyarakat Pascakonflik

Perang Gandor tidak hanya memengaruhi hubungan masyarakat dengan kekuasaan kolonial, tetapi juga menguji kemampuan komunitas dalam mempertahankan keteraturan sosial di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Sebelum konflik berlangsung, kehidupan masyarakat ditopang oleh hubungan kekerabatan, norma adat, kepercayaan, dan kebiasaan yang mengatur interaksi antarwarga. Unsur-unsur tersebut membentuk landasan pengendalian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ancaman kolonial semakin kuat, keberadaan norma bersama menjadi semakin penting karena masyarakat membutuhkan kepercayaan dan komitmen kolektif untuk menghadapi situasi yang mengancam keberlangsungan komunitas. Pengendalian sosial dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan adat, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat menjaga solidaritas dan menghindari tindakan yang dapat melemahkan persatuan kelompok.

Dalam situasi perang, orientasi pengendalian sosial mengalami perubahan karena ancaman tidak hanya datang dari luar, tetapi juga berkaitan dengan kemungkinan munculnya tindakan yang merusak kepercayaan di antara anggota komunitas. Narasi mengenai dugaan keterlibatan sebagian warga dalam memberikan informasi kepada pihak kolonial memperlihatkan bahwa persoalan kepercayaan menjadi bagian penting dalam dinamika konflik. Tindakan yang dipandang sebagai pengkhianatan terhadap kepentingan bersama dapat mengganggu koordinasi dan memperlemah konsolidasi masyarakat. Dalam konteks tersebut, sanksi sosial memperoleh makna yang lebih luas daripada sekadar pemberian konsekuensi atas pelanggaran norma. Sanksi sosial berkaitan dengan penegasan batas moral antara tindakan yang dianggap mendukung kepentingan komunitas dan tindakan yang dinilai merugikan kelompok. Idrus (2016) menjelaskan bahwa sanksi sosial dalam masyarakat Sasak berkaitan dengan mekanisme pengendalian perilaku dan pemeliharaan keteraturan hubungan sosial. Dalam konteks Perang Gandor, fungsi tersebut dapat dibaca sebagai upaya menjaga kepercayaan dan solidaritas di tengah ancaman konflik. Namun, bentuk sanksi, pihak yang menetapkan, dan mekanisme pelaksanaannya masih memerlukan dukungan keterangan empiris yang lebih terperinci agar tidak disimpulkan secara berlebihan.

Dampak konflik juga terlihat pada perubahan ruang kehidupan masyarakat Gandor. Pembakaran permukiman dan perpindahan penduduk menyebabkan masyarakat kehilangan sebagian ruang sosial yang sebelumnya menjadi pusat aktivitas bersama. Rumah, lahan pertanian, tempat berkumpul, dan lingkungan yang memiliki hubungan dengan sejarah keluarga tidak lagi dapat diakses atau digunakan seperti sebelumnya. Perpindahan ke wilayah lain, termasuk Selong dan Labuhan, menuntut masyarakat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru sekaligus mempertahankan hubungan sosial yang telah terbentuk. Perubahan ruang tersebut tidak serta-merta menghapus identitas masyarakat Gandor karena ingatan mengenai asal-usul, hubungan kekerabatan, dan pengalaman bersama tetap menjadi bagian dari kehidupan komunitas. Resiliensi spasial dalam konteks ini terlihat melalui kemampuan masyarakat membangun kembali kehidupan sosial di ruang yang berbeda tanpa sepenuhnya melepaskan keterikatan terhadap wilayah asal.

Pemeliharaan identitas tersebut juga dapat ditelusuri melalui keberadaan nama-nama tempat yang berkaitan dengan Gandor, seperti Peneda yang kemudian dikenal sebagai Penedagandor, Subak Gandor pada kawasan persawahan, dan Kampung Gandor di Selong. Nama-nama tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara identitas komunitas dan ruang geografis yang ditempati masyarakat. Dalam perspektif Halbwachs (1992), memori kolektif tidak hanya tersimpan dalam ingatan individu, tetapi juga dibentuk dan dipertahankan melalui lingkungan sosial tempat suatu kelompok menjalani kehidupannya. Sementara itu, konsep lieux

de mémoire dari Nora (1989) menjelaskan bahwa tempat dan penanda tertentu dapat menjadi ruang penyimpanan ingatan historis suatu komunitas. Berdasarkan perspektif tersebut, toponimi yang berkaitan dengan Gandor dapat dipahami sebagai penanda keberlanjutan memori kolektif masyarakat setelah mengalami konflik dan perpindahan. Nama tempat tidak sekadar berfungsi sebagai identitas geografis, tetapi juga menghubungkan generasi berikutnya dengan pengalaman sejarah komunitas. Penjelasan mengenai asal-usul dan makna khusus setiap nama tetap perlu diperkuat melalui wawancara dan dokumentasi sejarah lokal. Meskipun demikian, keberadaan penanda geografis tersebut menunjukkan bahwa pemulihan masyarakat pascakonflik tidak hanya berlangsung melalui pembangunan permukiman baru, tetapi juga melalui pemeliharaan ingatan dan identitas di dalam ruang kehidupan yang baru.

Kontribusi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Konflik dan Pemulihan Komunitas

Pengalaman masyarakat Gandor dalam Perang 1895 memperlihatkan bahwa kearifan lokal memiliki peran yang tidak terbatas pada pemeliharaan tradisi atau penyelesaian persoalan internal masyarakat. Dalam situasi konflik, nilai-nilai yang hidup dalam komunitas dapat menjadi dasar untuk membangun kesepakatan, memperkuat solidaritas, dan mempertahankan keberlangsungan hubungan sosial. Musyawarah adat, hubungan kekerabatan, penghormatan terhadap tokoh masyarakat, serta ikatan keagamaan merupakan unsur yang saling berkaitan dalam membentuk kemampuan komunitas menghadapi tekanan eksternal. Unsur-unsur tersebut bekerja melalui hubungan sosial yang telah terbentuk dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat memiliki landasan untuk menyatukan sikap ketika menghadapi ancaman bersama. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa kearifan lokal bukan sekadar warisan nilai dari masa lalu, melainkan sumber daya sosial yang dapat digunakan dalam menghadapi perubahan dan situasi krisis.

Kontribusi penting dari pengalaman tersebut terlihat pada perubahan fungsi mediasi adat. Musyawarah yang sebelumnya berorientasi pada penyelesaian persoalan di lingkungan komunitas berkembang menjadi sarana konsolidasi antardesa dalam menghadapi kekuasaan kolonial. Perubahan ini menunjukkan bahwa mekanisme adat memiliki sifat adaptif karena fungsi dan orientasinya dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Pandangan tersebut memperluas kajian mengenai penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal yang selama ini banyak menempatkan lembaga adat sebagai mediator untuk mengembalikan hubungan harmonis antarpihak yang berselisih (Dasor, 2020; Samsul, 2014). Peristiwa Gandor memperlihatkan bahwa dalam situasi tertentu, penyelesaian konflik tidak selalu dimulai dari upaya mempertemukan pihak-pihak yang bertentangan untuk mencapai perdamaian. Ketika masyarakat menghadapi ancaman terhadap keberlangsungan komunitas, langkah yang lebih mendesak adalah membangun persatuan internal, memperkuat koordinasi, dan mempertahankan kepentingan kolektif. Dalam kerangka tersebut, mediasi adat berperan sebagai mekanisme integrasi sosial sekaligus sarana membangun kekuatan bersama.

Kearifan lokal juga berkontribusi dalam mempertahankan keteraturan sosial ketika masyarakat menghadapi ancaman terhadap solidaritas internal. Norma adat dan nilai keagamaan menjadi rujukan moral dalam menentukan perilaku yang dianggap sesuai dengan kepentingan komunitas. Dalam situasi konflik, kepercayaan antaranggota masyarakat menjadi unsur yang sangat penting karena keberhasilan konsolidasi bergantung pada kesediaan setiap kelompok untuk menjaga komitmen bersama. Perubahan fungsi sanksi sosial dalam konteks Perang Gandor menunjukkan bahwa norma yang hidup di masyarakat dapat memiliki orientasi berbeda sesuai dengan situasi yang dihadapi. Pada masa damai, norma sosial terutama berfungsi

menjaga hubungan antarwarga, sedangkan dalam situasi perang, norma tersebut juga berkaitan dengan perlindungan solidaritas dan kepercayaan komunitas. Hal ini sejalan dengan kajian mengenai nilai sosial masyarakat Sasak yang menempatkan kearifan lokal sebagai bagian penting dalam mengatur hubungan sosial dan merespons konflik (Asyari & Kadri, 2025). Pengalaman Gandor memperlihatkan bahwa keberadaan nilai lokal dapat menjadi landasan pengendalian sosial ketika masyarakat menghadapi tekanan yang mengancam persatuan mereka.

Aspek lain yang memperlihatkan kontribusi kearifan lokal adalah kemampuan masyarakat mempertahankan identitas melalui ruang dan ingatan kolektif setelah mengalami kekalahan dan perpindahan. Pemeliharaan nama-nama tempat yang berkaitan dengan Gandor menunjukkan bahwa pemulihan komunitas tidak hanya berlangsung melalui penyesuaian terhadap lingkungan baru, tetapi juga melalui upaya menjaga hubungan dengan sejarah asal-usul. Memori mengenai wilayah asal, hubungan kekerabatan, dan pengalaman konflik menjadi bagian dari identitas yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalam hal ini, resiliensi spasial dan toponimi memperlihatkan hubungan antara ruang geografis, memori kolektif, dan keberlanjutan komunitas sebagaimana dijelaskan oleh Halbwachs (1992) dan Nora (1989). Temuan penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian resolusi konflik dengan menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat bekerja melalui tiga proses yang saling berkaitan, yaitu konsolidasi sosial melalui mediasi adat, pemeliharaan solidaritas melalui pengendalian sosial, serta pemulihan identitas melalui rekonstruksi ruang dan toponimi. Ketiga proses tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan komunitas menghadapi konflik tidak hanya ditentukan oleh hasil pertempuran, tetapi juga oleh kemampuannya mempertahankan hubungan sosial, nilai bersama, dan ingatan historis setelah konflik berakhir.

Kesimpulan

Perang Gandor 1895 di Desa Penedagandor, Lombok Timur, memperlihatkan bahwa strategi penyelesaian konflik masyarakat tidak hanya berlangsung melalui perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, tetapi juga melalui penguatan mekanisme sosial yang telah tumbuh dalam kehidupan komunitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi adat mengalami perubahan fungsi dari mekanisme penyelesaian persoalan internal menjadi sarana konsolidasi dan penyatuan sikap antarkelompok masyarakat dalam menghadapi ancaman bersama. Musyawarah yang melibatkan masyarakat Gandor, Apitaik, dan Teros mencerminkan pentingnya kesepakatan kolektif, hubungan kekerabatan, serta peran tokoh adat dan agama dalam membangun solidaritas. Pada saat yang sama, norma dan sanksi sosial memiliki arti penting dalam menjaga kepercayaan serta komitmen masyarakat agar hubungan internal tidak melemah di tengah konflik. Temuan ini menegaskan bahwa kearifan lokal bersifat dinamis karena dapat menyesuaikan fungsi dan orientasinya berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial dan tekanan eksternal.

Dampak Perang Gandor tidak berhenti pada kekalahan dalam perlawanan dan perpindahan penduduk, tetapi juga berkaitan dengan upaya masyarakat mempertahankan identitas setelah kehilangan ruang hidup asal. Keberlanjutan hubungan kekerabatan, ingatan kolektif, serta keberadaan penanda geografis yang berkaitan dengan Gandor memperlihatkan bahwa identitas komunitas tetap dipelihara meskipun masyarakat mengalami perubahan tempat tinggal. Dalam konteks ini, resiliensi spasial dan toponimi menjadi bagian dari proses pewarisan memori sejarah antargenerasi. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa pengelolaan konflik berbasis kearifan lokal mencakup keterkaitan antara

konsolidasi melalui mediasi adat, pengendalian sosial untuk menjaga solidaritas, dan pemeliharaan identitas melalui ruang serta ingatan kolektif. Namun, penjelasan lebih terperinci mengenai bentuk penerapan sanksi sosial dan asal-usul sejumlah toponimi masih memerlukan pendalaman melalui sumber lisan dan dokumentasi sejarah lokal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada penelusuran sejarah lisan masyarakat Gandor dan verifikasi sumber historis untuk memperkuat pemahaman mengenai proses perlawanan, perpindahan, serta keberlanjutan identitas komunitas pascakonflik.

Daftar Pustaka

Asyari, A., & Kadri. (2025). Nilai-nilai sosial di balik konflik dan kekerasan: Kearifan suku Sasak dalam tradisi Mbait dan Peresean. *Jurnal Penelitian Keislaman*, *18*(2).

Coser, L. A. (1956). *The functions of social conflict*. Routledge & Kegan Paul.

Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Dasor, Y. W. (2020). Revitalisasi peran lembaga adat dalam penanganan konflik sosial: Studi di Manggarai Nusa Tenggara Timur. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, *9*(3), 213–228.

Durkheim, E. (2013). *The division of labor in society*. Free Press. (Karya asli diterbitkan 1893).

Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (2011). *Getting to yes: Negotiating agreement without giving in*. Penguin Books.

Halbwachs, M. (1992). *On collective memory*. University of Chicago Press.

Humaedi, S. (2016). *Penyelesaian konflik berbasis nilai lokal*. Humaniora.

Idrus, N. (2016). *Sanksi sosial di masyarakat Sasak*. LEPPIM IAIN Mataram.

Krisna, C. A., & Jais, A. (2025). Peacebuilding multidimensional pascakonflik keagamaan di Indonesia: Integrasi peran generasi muda inovasi sosial dan rekonsiliasi sosial. *Al-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam*, *3*(1), 279–290.

Marzuki, R. (2018). *Nilai budaya dalam rekonstruksi komunitas*. Prenadamedia Group.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Mustafa, M. (2018). *Kolektivitas komunitas pascakonflik*. Social Politic Genius.

Nora, P. (1989). Between memory and history: Les lieux de mémoire. *Representations*, *26*, 7–24.

Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c. 1200*. Palgrave Macmillan.

Salam, M. R., & Jaya, L. R. P. (2005). Pemberontakan Gandor 1895: Sebuah perlawanan kaum sufi terhadap kekuasaan. *Ulumuna*, *9*(1).

Samsul, M. (2014). *Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat*. Pustaka Pelajar.

Sjamsoeddin, D. (1972). *Sedjarah perjuangan rakyat Indonesia di daerah Nusa Tenggara*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Syarifudin, A. (2015). *Kearifan lokal Sasak dalam mediasi konflik*. Insan Cendekia.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.